



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKA JUSUP SINGKA
2. Jabatan : KEPALA PUSAT KESEHATAN HAJI
3. NHK : 241528

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.659.258.400

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 289.258.400
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/43 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/2 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.036.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 365.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.187.294.400



III. HUTANG

Rp. 309.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.878.294.400

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.